

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

OLEH :

SULKIFLI YUNUS

105710204014



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

SULKIFLI YUNUS

105710204014

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program
Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** di Kabupaten Gowa ini ku persembahkan kepada Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad Yunus S.Sos dan Ibunda Hj. Rosmini Abdullah yang selalu memberikan kasih sayang, doannya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk saudaraku tercinta Suciyati Yunus S.T yang selalu memberikan arahan, perhatian dan motivasinya.

MOTTO HIDUP

Harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya.

-Adam Smith
(1723-1790)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar**



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Sulkifli Yunus

No. Stambuk/NIM : 105710204014

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551

Saida Said, SE, M.Ak

NBM. 1151806

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi IESP,

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM : 903 078

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar



LEMBAR KONTROL BIMBINGANSKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sulkifli Yunus

No. Stambuk/NIM : 105710204014

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Nama Pembimbing 1 : Hj. Naidah, SE, M.Si

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan
Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gowa

No	Hari/Tanggal	Uraikan Perbaikan/Saran	Paraf/Tanda Tangan

Makassar, 27 Juli 2018

Mengetahui:

Ketua Program Studi IESP

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sul kifli Yunus

No. Stambuk/NIM : 105710204014

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Nama Pembimbing 2 : Saida Said, SE, M.Ak

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan
Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gowa

No	Hari/Tanggal	Uraikan Perbaikan/Saran	Paraf/Tanda Tangan



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar**

--	--	--	--

Makassar, 27 Juli 2018

Mengetahui:

Ketua Program Studi IESP

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM.710551



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar**


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkifli Yunus

NIM : 105710204014

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dengan Judul : “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gowa”.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Juli 2018

Sulkifli Yunus

Diketahui oleh :

Dekan,

Ketua Program Studi IESP,

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM : 903 078

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dengan penuh perjuangan dan kebanggaan yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa”.

Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad Yunus S.Sos dan Ibunda Hj. Rosmini Abdullah yang selalu memberikan kasih sayang, doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, harapan adanya kritik dan masukan yang sifatnya membangun dari para pembaca. Di harapkan melalui hasil penelitian ini, di peroleh informasi tambahan bagi pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan masalah pendapatan daerah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan mengingat masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan, dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselasaikan. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para pembantu rektor

serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Hj. Naidah SE.,M.Si selaku ketua jurusan sekaligus dosen pembimbing I saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Saida Said SE.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf akademik, Staf jurusan Ilmu Ekonomi, Staf perpustakaan, pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Badan Pusat Statistik (BPS) Gowa yang telah memberikan bantuan berupa informasi data tentang penelitian yang di butuhkan.
7. Keluarga tercinta khususnya kakakku Suciyati Yunus S.T yang selalu membuat jengkel dalam memberikan arahan dan motivasi tapi kadang berguna
8. Terimakasih untuk my special friend yang selalu menemani, mendengar keluh kesah, memberikan bantuan serta semangat motivasi ketika menemukan kesulitan dalam menyusun skripsi ini
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi IESP angkatan 2014 khususnya kelas IESP 2 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya, dorongan dalam aktivitas studi, kenangan bersama kalian adalah salah satu kenangan paling indah. Terimakasih banyak

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan meberikan berkah dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Aminn

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Terima kasih

Makassar, 27 Juli 2018

Sulkifli Yunus
105710204014

ABSTRAK

Sulkifli Yunus. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa*, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. di Bimbing oleh Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, Pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, dan variabel paling berpengaruh terhadap PAD di kabupaten Gowa. Penelitian ini di buat karena masih terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Data sekunder yang di gunakan adalah data time series periode 2006-2015. Variabel independen terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD

Kebijakan yang dapat di ambil berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa adalah dengan cara memungut pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil laba BUMD agar di gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan PAD. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dengan begitu di harapkan pemerintah daerah berhak menggerakkan pungutan kepada masyarakat agar pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten gowa menjadi lebih baik.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

Sulkifli Yunus. 2018. *The effect of local taxes, regional retribution, and profit on local revenue in Gowa*, Essai Progam Economic Studies of Development University of Muhammadiyah Makassar. Guide by I Hj. Naidah and Guide by II Saida Said.

This research purpose is to know: local taxes influence on locally. Generated revenue (PAD) at Gowa regency. Regional levies influence on locally. Generated revenue (PAD) at Gowa regency. Influence of BUMD's earning on locally generated revenue (PAD) at Gowa regency. And the most influence variable on PAD at Gowa regency. This research was made due to difference research. This research uses multiple regression analysis method. Secondary data uses time series data priod of 2006-2015. Independent variable consist of local text regional levies and BUMD profits.

The policy that can be taken based on research on the effect of local taxes, regional retribution, and profit on local revenue in Gowa regency is by collecting local taxes, levies, and BUMD lab results to be used as possible to increase PAD. Regional taxes, regional retribution, and Profit of BUMD's could increase the efficiency and effectiveness of government administration and services of the community this expected local government have the right to mobilize levies to the community so that the local PAD at Gowa regency became better.

The key word : Tax, Retribution, Profit BUMD and Generated revenue (PAD)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak	8
B. Retribusi Daerah.....	20
C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	26
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
E. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	32
F. Penelitian Terdahulu.....	32
G. Kerangka Fikir	35
H. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Populasi Sampel.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
E. Defenisi Operasional	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
a. Letak Geografis Kabupaten Gowa	48
b. Luas Wilayah	50
c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa.....	51
d. Struktur Organisasi Dispenda	53
B. Deskripsi Hasil Penelitian	56
C. Hasil Analisis Data.....	62
1. Analisis Uji Asumsi Klasik.....	62
2. Analisis Linier Berganda	65
3. Analisis Uji Hipotesis.....	67
D. Pembahasan	70
E. Pembahasan Penelitian.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
LAMPIRAN DATA	78
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Fikir	36
Gambar 2 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	53
Gambar 2 3 Normal P-P of Regression Standardized Residual	62
Gambar 2 4 Regression Standardized Predicted Value (Scatterplot)	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1	Luas Kab. Gowa di rinci menurut luas kecamatan	50
Tabel 4 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Gowa Tahun 2001-2013	52
Tabel 4 3	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa	57
Tabel 4 4	Target dan Realisasi Daerah Kabupaten Gowa	58
Tabel 4 5	Perkembangan Penerimaan BUMD Kabupaten Gowa	60
Tabel 4 6	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak menggerakkan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Selama itu juga pungutan daerah berupa pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota.

Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Gowa berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Gowa.

Selain memaksimalkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa salah satu yang dilakukan adalah menggenjot penerimaan dari BUMD sehingga dapat mewujudkan tujuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa. Terlebih lagi pendapatan asli daerah saat ini masih kurang kontribusi dari badan usaha milik daerah karena hasilnya banyak yang diamankan oleh petugas tertentu saja. Dan bukan saja berkaitan dengan hal BUMD ataupun pajak dan sebagainya, sehingga dapat dipastikan kalau begini keadaannya maka pendapatan asli daerah tidak akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah di daerah tersebut.

Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.

Potensi penerimaan Pajak, Retribusi, dan Laba BUMD daerah di Kabupaten Gowa seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten gowa melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut

diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul“ **Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas. Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?
3. Apakah Laba BUMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?
4. Variabel manakah berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa
3. Pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.
4. Variabel berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.

- **Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Gowa diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pemahaman tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD agar dapat lebih

memahami seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Gowa.

4. Bagi pihak lain. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Selain itu pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak juga biasa diartikan sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah juga dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah (9): 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambilah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka” (Q.S Al-Taubah [9]: 103).

3. Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak balik Nma Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air dan Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 9) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

5. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung yaitu: pajak yang harus dipikul sendiri Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung yaitu: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak Dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan bersama pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, biasanya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dan pada pajak yang menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

7. Sistem Pemungutan Pajak

a. Self Assesment

Self Assesment adalah suatu sistem pemungut pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang tentang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pmungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk.

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus bayar.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi

Ciri-ciri sistem Self Assesment adalah :

- a. Adanya kepastian hukum.
- b. Sederhana perhitungannya.
- c. Mudah pelaksanaan.
- d. Lebih adil dan merata.
- e. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. Offical Assessment

Offical Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah

pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparaturnya perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

8. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonom pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab, Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang. Kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambil keputusan yang dilakukan oleh daerah. **Pertama**, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintahan daerah yang dinamakan dekonsentrasi. **Kedua**, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. **Ketiga**, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Prinsip pemberin otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.

3. Mendorong Pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

10. Fungsi Desentralisasi Fiskal:

- a. Mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat.
- b. Memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintah.
- c. Memperkuat sistem pemerintah daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal.
- d. Merevitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- e. Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut diatas telah dilaksanakan.

Defenisi pajak didukung oleh kebijakan fiskal perlu diterapkan menurut kaum Keynesian, karena:

1. Fluktuasi ekonomi muncul karena adanya perubahan penafsiran atas permintaan agregat.
2. Tingkat upah dan tingkat harga lambat mengalami perubahan,
3. Dibanding dengan kebijakan moneter, maka kebijakan fiskal lebih mantap.
4. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya kesalahan pasar yang mengutamakan pada prinsip individu.

Dalam Perpajakan diatur oleh Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan permintaan dalam anggaran dan belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, Sebagaimana juga layaknya suatu rumah tangga individu maka pemerintahan sebagai rumah tangga nasional juga memerlukan pendapatan untuk membiayai operasional sehari-hari misalnya seperti mengaji pegawai negeri, mengatur dan mengurus Negara dan pemerintah.

Adapun uang yang dijadikan pendapatan oleh pemerintah yang terutama dalam suatu Negara adalah "PAJAK" yang di "PUNGUT" dari masyarakatnya, selain itu tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri, pendapatan dari perusahaan Negara dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Kebijakan ***Fiskal deskresioner*** yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi. Pemerintah akan melakukan kebijakan belanja surplus (kebijakan ekspansif) bila mengetahui perekonomian dalam kondisi pengangguran yang tinggi, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang tinggi sebaliknya pemerintah akan melakukan kebijakan belanja deficit (kebijakan kontratif) apabila menganggap bahwa tingkat pengangguran dalam kondisi yang wajar, suku bunga terlalu rendah, dan tingkat harga terlalu lambat berubah.

- b. Kebijakan Fiskal dengan ***Penstabil Otomatis*** yaitu kebijakan yang langsung berhubungan dengan pajak, asuransi penganggurandan kebijakan harga minimum.

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Terkait dengan retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan diri. 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

Selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

- a. Jasa Umum

- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

3. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Selain perluasan pajak, dalam undang-undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Retribusi izin gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha-usaha terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu retribusi pelayanan tera/teraaulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan.

4. Jenis Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

- e. Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

5. Retribusi jasa usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
 - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - 3) Retribusi tempat pelelangan

- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyeberangan di air

6. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

7. Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

8. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan Sasaran penetapan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan. Yang biaya penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatuf dari pemberian izin tersebut.

9. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam Hal wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah (STRD). Penagihan Retribusi sebagaiman didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

10. Pemanfaatan retribusi

Pemanfaat dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik daerah yang didirikan dengan pengaturan daerah berdasarkan UUD No.5 tahun 1962, dengan modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan adanya kerja sama daerah dalam bidang ekonomi serta saling keterkaitan satu daerah lainnya membuat berbagai alternatif dalam permodalan BUMD.

Sumber Modal BUMD diantaranya:

- a. Seluhnya berasal dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan.
- b. Seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) atau yang dikenal sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), jarang sekali menjadi sorotan media massa. Hal ini kemungkinan disebabkan kurang menarik untuk dijadikan berita sebagai wacana publik. Sebenarnya banyak *asset* daerah di Indonesia ini, kalau diteliti memiliki potensi yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

2. Fungsi dan Peranan BUMD

Keberadaan BUMD didasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu :

1. Mendorong kegiatan ekonomi daerah
2. Menciptakan kesempatan kerja
3. Menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi terhadap PAD

3. Ruang Lingkup BUMD

Survei BUMD mencakup seluruh perusahaan milik daerah yang terbesar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dimana sebagian atau lebih sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah perusahaan BUMD yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi seluruh keuangan usaha. Di beberapa provinsi terdapat BUMD yang bergerak pada lapangan usaha tertentu, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak pada lapangan usaha tertentu, seperti perusahaan yang bergerak dilapangan usaha Air Minum (Perusahaan Daerah Listrik, Gas dan Air) dan lapangan usaha perbankan BPD (Bank Pembangunan Daerah).

4. Problem Pengelolaan BUMD

Karyawan yang bekerja pada BUMD umumnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kinerja PNS termasuk karyawan BUMD, seringkali mendapat kritik dari masyarakat yang dilayani, karena dalam menjalankan tugas-tugasnya cenderung tidak profesional. Dalam iklim kerja birokratik,

seorang bawahan cenderung menunggu petunjuk, sebelum mengambil keputusan. Akibatnya kreativitas kurang berkembang. Ide-ide inovatif, tidak muncul. Sifat *entrepreneuership* pada manajemen BUMD pada umumnya kurang berkembang. Ambil contoh masih menurut sumber KR, bank pasar di Boyolali banyak dijabat oleh para pensiunan. Walaupun itu belum tentu buruk, tetapi dapat ditebak, sifat profesional dan *entrepreneuership* manajemen badan usaha tidak akan berkembang.

Persoalan modal, memang menjadi hambatan bagi BUMD, karena selama ini, BUMD pada umumnya tidak bisa secara bebas mengambil kebijakan keuangan, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah. Keterikatan dengan peraturan daerah sangat ketat. Oleh sebab itu, dalam pengembangan BUMD, agar lembaga bisnis ini mampu berperan secara mandiri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kendala-kendala seperti peraturan, rendahnya kualitas SDM, cara-cara kerja birokratik yang menghambat inovasi dan sebagainya, perlu diatasi. Dengan kendala-kendala seperti itu, sangat sulit bagi manajemen BUMD untuk melakukan terobosan-terobosan terutama dalam penyehatan dan pengembangan perusahaan.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja

perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3. Peranan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Saragih (1996:39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relative meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relative minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relative menguntungkan dari segi ekonomi.

4. Isu Variabel Pajak, Variabel Retribusi Daerah dan Variabel BUMD Terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah

Dalam otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan dimana masalah keuangan sangat menentukan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah oleh karena itu masalah kemampuan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk digalih, sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pelaksanaan otonomi daerah akan ideal jika Pajak Daerah yang menjadi penyumbang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kondisi yang seperti itu akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang akan diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri

karena kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Begitu juga dengan Retribusi juga mempunyai peran yang cukup signifikan dan tidak bisa dipandang lemah kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemda didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Selain itu juga Laba BUMD memiliki peran yang diharapkan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Otonomi daerah menjadikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan.

Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga

memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

E. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1), PAD dapat bersumber dari;(1) Pajak Daerah;(2) Retribusi Daerah;(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;(4) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;(1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;(2) Jasa Giro;(3) Pendapatan Bunga;(4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;(5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini merupakan replikasi oleh Evi Apriani (2011) dengan judul Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Periode 2000-2009. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah analisis regresi

berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t.

Hasil simpulan dari peneliti menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Sumber Penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan PAD pemerintah Kota Makassar dalam kurung waktu Tahun 2000-2009 cukup signifikan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemerintahan di kota Makassar tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD pemerintah Kota Makassar perlu dilakukan beberapa langkah diantaranya melakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

2. Penelitian kedua yang melakukan penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar dilakukan oleh Nanang Budiando (2013). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t. Hasil analisis data menunjukkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Makassar tahun 2006-2010.
3. Penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di lakukan oleh Rizky Dwi Nur Annisa (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t. Hasil analisis data menunjukkan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2006-2015, penelitian ini dilakukan penambahan satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa, yaitu variabel Laba BUMD Kabupaten Gowa

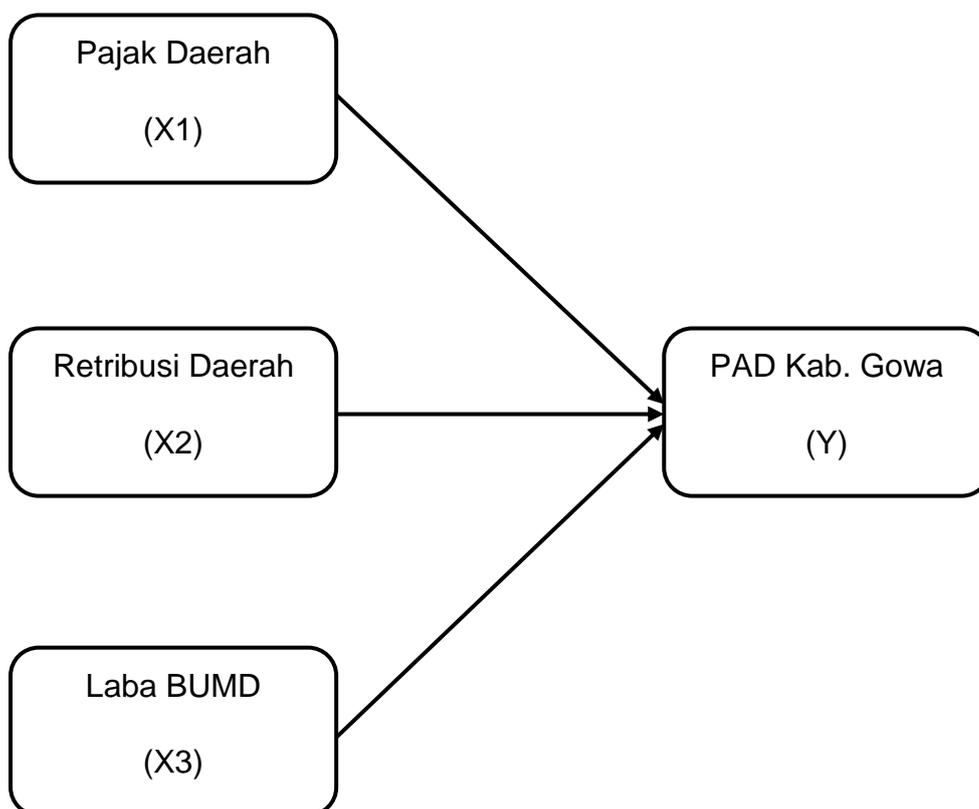
G. Kerangka Fikir

Pajak, Retribusi Daerah dan Laba BUMD yang menjadi penerimaan bagi Daerah, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi daerah serta masyarakat dari daerah tersebut. Tuntutan akan peningkatan dari penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan, retribusi daerah serta Laba BUMD akan menyehatkan perekonomian suatu daerah melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan perubahan peningkatan suatu Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai penerimaan untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan ekonomi maka pemerintah berusaha menggali sumber-sumber penerimaan Daerah yang akan bermanfaat untuk memperbaiki Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Gowa, Karena seperti yang kita ketahui dengan adanya ketiga sumber pendapatan daerah maka itu akan membantu pertumbuhan dari pendapatan daerah itu sendiri.

Berdasarkan **Gambar 2.1** Pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur Pajak, Retribusi dan BUMD sebagai Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah menerima setoran pajak, retribusi dan BUMD untuk meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu daerah. Karena pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.

Gambar 2 1 Kerangka Fikir



H. Hipotesis

Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa
3. Laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa
4. Variabel Pajak Daerah merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Gowa sebagai objek penelitian dengan menetapkan data Pajak, Retribusi Daerah, BUMD dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa yang berlokasi di Jln. Masjid Raya No 36, Sungguminasa. Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 01 April sampai dengan Mei 2018.

B. Populasi Sampel

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian melalui data sekunder dengan jenis data turun waktu (*time series*) selama kurun waktu 2006-2015. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gowa periode 2006-2015 menggunakan data tahunan.
2. Data penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Gowa periode 2006-2015, menggunakan data tahunan.
3. Data Laba BUMD di Kabupaten Gowa periode 2006-2015, menggunakan data tahunan.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2006-2015. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang dipergunakan meliputi: data Pajak Daerah, data Retribusi Daerah, data Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai

dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang disebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui.

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(1)$$

Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas berikut:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} e^{\dots\dots\dots}(2)$$

Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein (1988) mengadakan transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Laba BUMD

β_0 = Konstanta

β_1 - β_3 = Parameter

μ = Error term

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap variable dependen, semakin besar R^2 semakin besar peranan variable dalam menjelaskan variable dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1.

1. Uji asumsi klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasanya dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Adapun asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

a. Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinieritas data

Uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO). Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasikan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar analisis terjadi heteroskedastisitas adalah:

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji analisis regresi berganda

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Uji F Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Dimana jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel *independen* secara

bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *dependen* (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variable yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0: \alpha_1, \alpha_2, = 0$ semua variabel independen tidak mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama.

$H_1: \alpha_1, \alpha_2, \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} >$ tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak, artinya variable penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} <$ tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak, artinya variable penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variable yang dijelaskan secara signifikan.

b. Uji t Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variable bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variable *dependent* secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

E. Defenisi Operasional

Operasionalisasi penelitian ini dibagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel independent dan variabel dependent:

1. Variabel Independent

Variabel independent adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel tak bebas). variabel independent dalam penelitian ini adalah:

- a. Pajak Daerah (X1) yaitu penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah dalam penelitian ini yaitu besarnya penerimaan pajak pertahun yang diukur dengan Rupiah.

- b. Retribusi Daerah (X2) yaitu besarnya penerimaan retribusi daerah. dalam penelitian ini yaitu penerimaan retribusi pertahun yang diukur dengan Rupiah. Sedangkan,
- c. Laba BUMD (X3) adalah banyaknya penerimaan Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa, dalam penelitian ini yaitu banyaknya penerimaan keuntungan yang diterima oleh BUMD Kabupaten Gowa.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.

2. Variabel Dependent

Variabel Dependent adalah variabel tak bebas yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Dalam

penelitian ini pendapatan asli daerah yang diterima pertahun yang diukur dengan Rupiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli – September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b. Luas Wilayah

Tabel 4 1
Luas Kab. Gowa di rinci menurut luas kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecamatan (Km ²)	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa

Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus juga mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang di produksi oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun defenisi dari pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, termasuk memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini.
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar.

Dalam penelitian ini kategori Produk Domestik Regional Bruto yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku periode tahun 2001-2013 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten
Gowa Tahun 2001-2013

TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Juta/Rupiah)	%
2001	1243.26	7,3
2002	1410.50	7,14
2003	1592.52	
2004	1830.17	8,6
2005	2123.28	10,17
2006	2457.66	7,16
2007	2854.93	8,09
2008	3473.36	8,11
2009	4309.67	10,52
2010	5082	9,2
2011	5931	8,15
2012	6791	8,05
2013	7833	7,50
Total	46.932,35	99,99

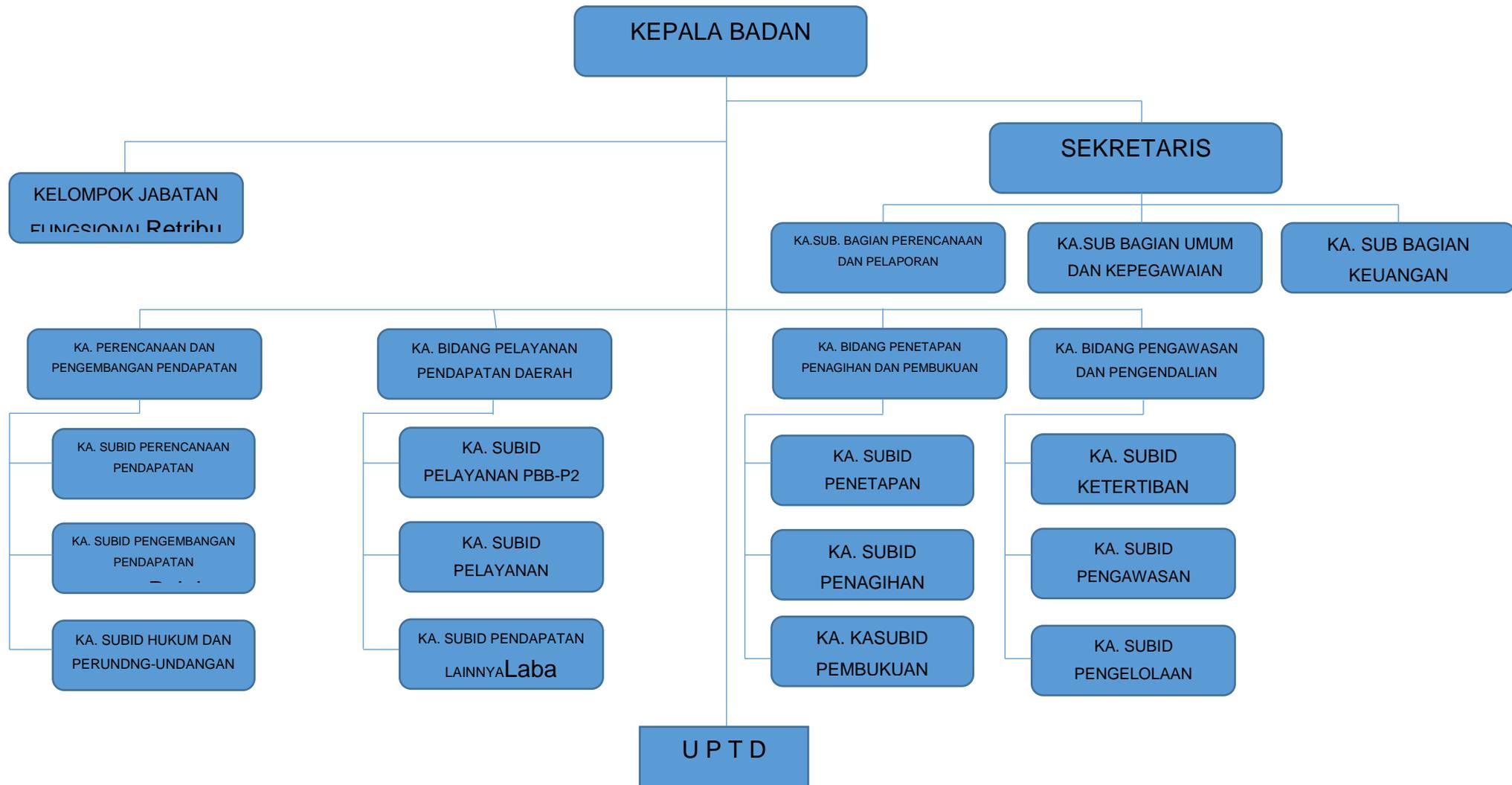
Sumber : BPS Gowa, PDRB Gowa

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat keadaan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Gowa selama periode tahun 2001-2013 mengalami kenaikan terus dari tahun ketahun. kita dapat melihat pada tahun pada tahun 2001-2013 mencapai Rp. 46.932,35 (dalam milyar)

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Gowa inimenunjukkan bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Gowa mengalami perkembangan terus menerus.

d. Struktur Organisasi Dispenda

Gambar 2 2
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa



Penjabaran Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Aset dan Investasi

Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi, mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan aset dan investasi daerah.

Bidang Aset dan Investasi mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang aset daerah dan investasi;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah dan investasi;
- c. Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bidang Aset dan Investasi berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.

4. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa, melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan asli daerah yang dimulai dari pendataan/pendaftaran, penetapan, pembukuan, penagihan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan;
- c. Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

5. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran daerah dan pengelolaan perbendaharaan gaji;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka kesepakatan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum APBD Perubahan.

6. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten serta evaluasi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penetapan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten;
- b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
- c. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent).

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- a. UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- b. UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis operasional;
- c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Kabupaten Gowa

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Melihat pentingnya pajak daerah dalam sumber pendapatan daerah maka perlu dilakukan peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahun dengan mengkaji potensi-potensi pajak yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut.

Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah Kabupaten Gowa, berikut ini penulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan pajak Kabupaten Gowa sejak tahun 2006 sampai tahun 2015.

Tabel 4 3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Jumlah Presentase Pajak (%)
2006	11.560.237	11.470.021	101%
2007	12.153.417	11.808.577	103%
2008	15.015.943	8.516.681	176%
2009	20.878.470	49.705.065	42%
2010	21.098.500	9.702.395	217%
2011	24.353.397	25.728.020	95%
2012	30.167.000	35.655.815	85%
2013	55.223.339	57.065.945	97%
2014	61.500.818	63.143.326	97%
2015	70.579.000	72.080.464	98%
Jumlah	322.530.121	344.876.309	94%

Sumber: BPS Kabupaten Gowa

Pada tabel diatas juga dapat digambarkan bahwa tahun 2006-2015 terlihat realisasi pajak sebagian besar melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa berhasil dalam memungut pajak daerah terhadap masyarakat dan potensi penerimaan sumber-sumber pajak dapat dimaksimalkan.

Penerimaan pajak di Kabupaten Gowa terlihat mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini disebabkan oleh meningkatnya wajib pajak yang ada di Gowa. Pembangunan perekonomian yang pesat di Kabupaten Gowa yang disertai dengan meningkatnya minat para pengusaha (investor) untuk berinvestasi dengan membuka usaha baru mulai dari pertanian dan wisata menyebabkan meningkatnya penerimaan

pajak di Kabupaten Gowa, selain itu sumber pajak potensial di Kabupaten Gowa adalah pajak kendaraan bermotor.

2. Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gowa

Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalan dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola retribusi daerah dan perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Gowa,

Untuk melihat sejauh mana penerimaan retribusi Kabupaten Gowa, berikut ini penulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan retribusi Kabupaten Gowa sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4 4
Target dan Realisasi Daerah Kabupaten Gowa

Tahun	Target	Realisasi Retribusi	Jumlah Presentase Retribusi (%)
2006	10.355.200	16.437.036	63%
2007	15.665.752	15.080.961	104%
2008	21.817.814	26.258.847	83%
2009	24.760.065	29.964.878	83%

2010	30.553.065	36.660.593	83%
2011	32.081.060	32.506.992	99%
2012	35.311.098	31.223.980	113%
2013	36.891.000	37.494.501	98%
2014	40.357.505	53.159.807	76%
2015	44.611.124	45.700.441	98%
Jumlah	292.403.683	324.488.036	90%

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 4.4 diatas jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan retribusi di Kabupaten Gowa terlihat mengalami pertumbuhan yang meningkat dan signifikan hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Gowa dalam memaksimalkan penerimaan retribusi sudah maksimal hal ini menyebabkan target yang sudah ditetapkan setiap tahun selalu tercapai tapi signifikan. Maksimalnya penerimaan retribusi akan berdampak pada penerimaan PAD Kabupaten Gowa karena Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar setelah pajak sehingga diharapkan penerimaan retribusi dapat dimaksimalkan lebih besar lagi.

3. Penerimaan laba BUMD Kabupaten Gowa

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu penunjang penerimaan Pendapatan Daerah, guna menunjang upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penerimaan dari BUMD yang ada di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4 5
Perkembangan Penerimaan BUMD Kabupaten Gowa

Tahun	Target	Realisasi laba BUMD	Jumlah presentase laba BUMD (%)
2006	423.180	557.567	8%
2007	635.720	694.427	9%
2008	1.100.970	1.348.051	82%
2009	1.272.060	-	-
2010	1.731.890	2.489.025	70%
2011	2.000.230	1.692.635	118%
2012	2.272.042	2.004.196	113%
2013	2.382.220	3.075.276	77%
2014	2.433.100	2.444.802	100%
2015	2.500.000	2.507.985	100%
Jumlah	16.751.412	16.813.964	100%

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 4.6 diatas perkembangan Penerimaan laba BUMD di Kabupaten Gowa tahun 2006-2015 terlihat mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Meningkatnya penerimaan dari BUMD Kabupaten Gowa disebabkan adanya upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gowa.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakannyang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna

dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Tabel 4 6

Tahun	Target	Realisasi PAD	PERTUMBUHAN (%)
2006	20.665.752	35.703.518	58%
2007	27.814.817	33.371.642	83%
2008	30.553.899	45.827.484	67%
2009	40.760.500	85.398.844	48%
2010	51.505.357	54.812.691	94%
2011	65.718.891	82.221.491	80%
2012	73.408.601	78.700.220	93%
2013	98.060.081	109.776.256	89%
2014	120.124.000	149.352.694	80%
2015	145.814.891	154.772.383	94%
Jumlah	674.426.789	829.937.964	81%

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Dari tabel diatas peningkatan penerimaan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Indikator Kenaikan PAD Kabupaten Gowa terdiri dari Pajak daerah, retribusi dan laba BUMD Kabupaten Gowa. PAD Kabupaten Gowa mengalami peningkatan setiap tahunnya karena Pemerintah Kabupaten Gowa mampu memaksimalkan potensi pendapatan dengan meningkatkan penerimaan Pajak daerah sebagai sumber utama PAD Kabupaten Gowa, selain itu peningkatan penerimaan retribusi daerah dan meningkatnya pendapatan dari BUMD Kabupaten Gowa menjadikan PAD Kabupaten Gowa tumbuh setiap tahunnya.

C. Hasil Analisis Data

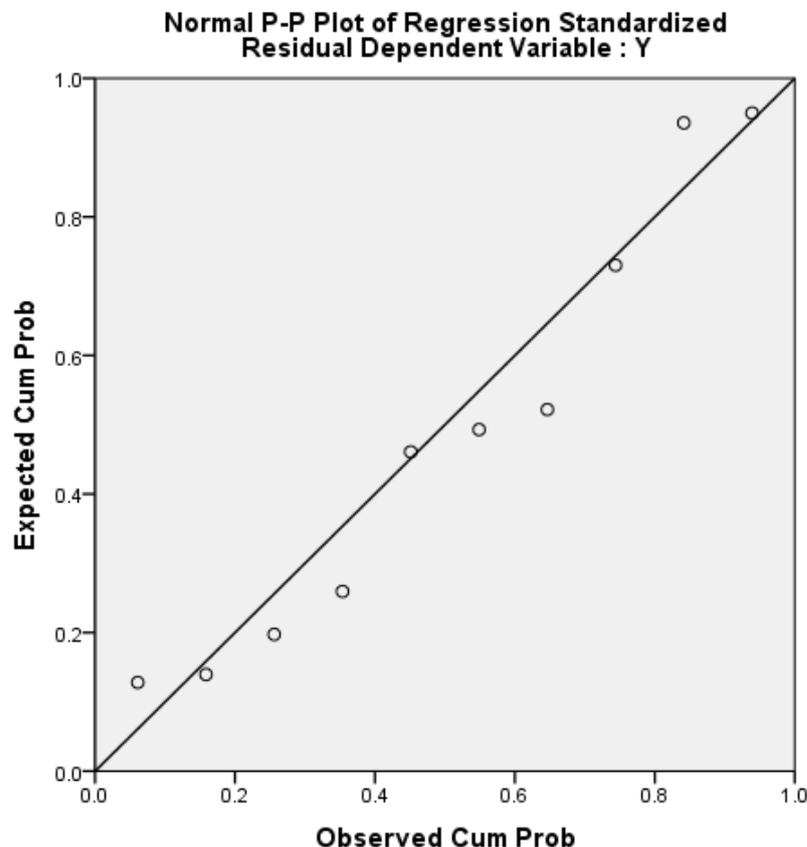
1. Analisis Uji Asumsi Klasik

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis korelasi dan regresi berganda yang terdiri atas :

a. Uji Normalitas Data

Pada grafik Normal P-Plot of Regression Stand dibawah, terlihat titik-titik (data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier), sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 23
Normal P-P of Regression Standardized Residual



Sebagaimana terikat dalam grafik normal P-P plot of regression standrdiset residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa berdasarkan variabel bebasnya.

b. Uji Linieritas Data

Pada grafik Normal P-Plot of Regresion Stand diatas, terlihat titik-titik (data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier) sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.

c. Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas data perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO). Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasi bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

Besaran VIF (variance inflation factor) dan Tolerance, pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :

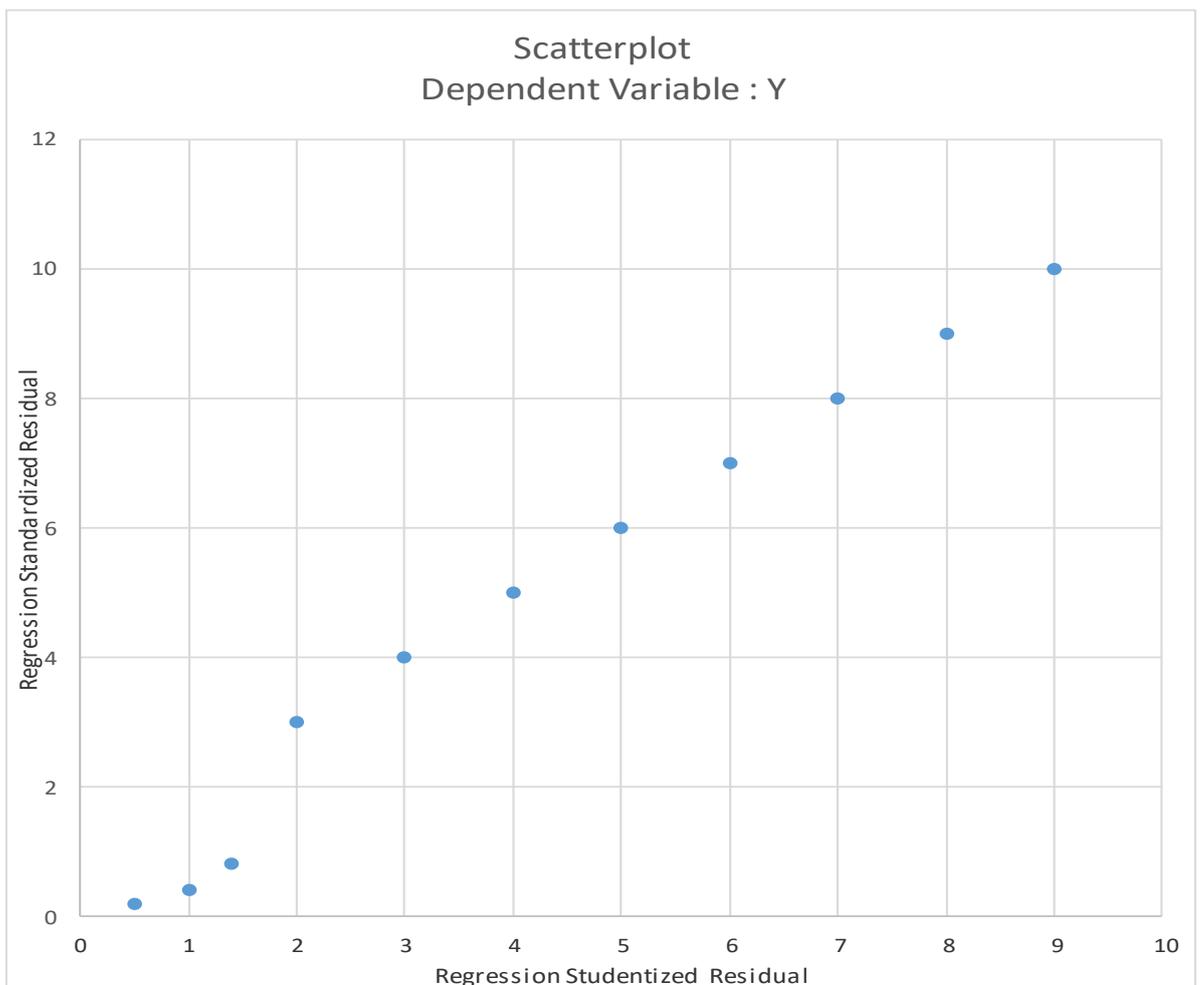
- a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka.
- b) Mempunyai angka TORELANCE disekitar angka 1.

d. Uji Heteroskedastisitas Data

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 24
Regression Standardized Predicted Value (Scatterplot)



Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasar masukan variabel independent-nya.

2. Analisis Linier Berganda

Untuk dapat membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya, bahwapajak daerah, retribusi daerah dan BUMD mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, maka dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan diperoleh dan diolah dengan menggunakan Microsoft Office Exel 2013 dan hasil olahan tersebut selanjutnya diestimasi ke dalam program Statistik dengan menggunakan perangkat lunak (Software) yaitu SPSS 22.

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-6475688.047	8795721.763		-.736	.489
	PAJAK (X1)	1.115	.181	.624	6.160	.001
	RETRIBUSI (X2)	1.535	.496	.414	3.096	.021
	LABA BUMD (X3)	.723	4.150	.017	.174	.867

a. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6475688 + X_1 1,115 + X_2 1,535 + X_3 723$$

a) Koefisien Regresi

Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Konstanta sebesar 64.756.688, dapat dinyatakan bahwa apabila tidak ada pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD maka nilai dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 64.756.688.
2. Nilai Koefisien regresi pajak sebesar 1.115, dapat dinyatakan apabila pajak daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp.1.115. Dan sebaliknya jika pajak Kabupaten Gowa turun sebesar Rp. 1 maka PAD akan turun sebesar Rp.1.115
3. Nilai Koefisien regresi sebesar 1.535, dapat dinyatakan bahwa Apabila retribusi daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 1.535. Dan sebaliknya apabila retribusi turun sebesar Rp. 1 maka PAD akan turun sebesar Rp. 1.535
4. Nilai Koefisien Regresi BUMD 723, dapat dinyatakan bahwa apabila BUMD meningkat sebesar Rp. 1 maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 723. Dan sebaliknya jika BUMD turun sebesar Rp.1 maka PAD akan turun sebesar Rp. 723

b) Koefisien Determinasi

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase darivariansi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh :

Tabel 4. 2
Hasil Olah Data Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.965	8206080.23574

a. Predictors: (Constant), LABA BUMD (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui nilai R-square sebesar 976 yang artinya bahwa besarnya proporsi kontribusi keeratan hubungan antara variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD terhadap PAD adalah 99,90 yang artinya bahwa 99,90 persen variasi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa dapat dijelaskan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD. Sedangkan selebihnya sebesar 0.10 persen dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Analisis Uji Simultan (f)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian statistik F ini dilakukan dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel.

Tabel 4. 3
Nilai Signifikansi Uji-f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1676798403545	3	5589328011819	83.002	.000 ^b
		8420.000		475.000		
	Residual	4040385170123	6	6733975283538		
		06.400		4.400		
	Total	1717202255247	9			
		0730.000				

a. Dependent Variable: PAD (Y)

b. Predictors: (Constant), LABA BUMD (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gowa dilakukan uji-F, pada tabel ANAVAR. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

H_1 ; sekurang-kurangnya satu nilai β tidak sama dengan nol

Kriteria pengujian adalah H_0 ditolak atau H_1 diterima, jika nilai F pada tabel ANAVAR lebih besar dari F_{hitung} , pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} \leq$ dari nilai F_{tabel} , maka H_0 diterima. Jika pengujian menyimpulkan bahwa H_1 yang diterima.

Hasil uji F yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.10 tentang analisis varians dengan memperhatikan hipotesis sebagai berikut:

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 1876.560 > 5,143 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis diatas menolak H_0

atau menerima H_1 hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan laba BUMD hanya berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Analisis Uji Parsial

Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh signifikan/bermakna dilakukan uji-t.

$H_0 : \beta_i (i=1,2,3,4) = 0$ tidak terdapat pengaruh signifikan variabel Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa

$H_0 : \beta_i (i=1,2,3,4) \neq 0$ terdapat pengaruh signifikan variabel Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada kolom signifikansi dan nilai t di tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05

Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu :

Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak (rejected)

Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima (not rejected)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa :

1) Pajak daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel dibawah dimana nilai koefisien regresi Pajak Daerah Kabupaten Gowa sebesar 1.115 dan nilai signifikan sebesar 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan variabel Pajak daerah Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa. Hipotesis dalam penelitian ini diterima.

2) Retribusi Daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Koefisien regresi retribusi Daerah Kabupaten Gowa sebesar 1.535 dan nilai signifikan sebesar 0,011 dinyatakan lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan variabel Retribusi Daerah Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa. Hipotesis dalam penelitian ini diterima.

3) Laba BUMD Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien regresi BUMD Kabupaten Gowa sebesar 723 dan nilai signifikan BUMD sebesar 0,338 dinyatakan lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga BUMD Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa .

D. Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,115 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ H_1 diterima (signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 persen pajak daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp. 1.115 dan sebaliknya setiap penurunan Rp.1 pajak daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan turun sebesar Rp. 1.115. Arah hubungan antara pajak daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah(+), dimana kenaikan atau penurunan pajak daerah

Kabupaten Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri. Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan pendapatan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel diatas dimana nilai koefisien regresi sebesar 6,391 dengan tingkat signifikan $0,011 < 0,05$ H1 diterima (signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 Retribusi daerah kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp. 1.535 dan sebaliknya setiap penurunan Rp. 1 retribusi daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan turun sebesar Rp. 1.535. Arah hubungan antara retribusi daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah(+) dan signifikan, dimana kenaikan atau penurunan retribusi daerah Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil studi ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010), Amri. Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

c. Pengaruh laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,338 dengan tingkat $0,338 < 0,05$ H_0 diterima (tidak signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 BUMD daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp.723 dan sebaliknya setiap penurunan Rp. 1 BUMD Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan turun sebesar Rp. 723. Arah hubungan antara retribusi daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah (+) dimana kenaikan atau penurunan BUMD Kabupaten Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan laba BUMD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

d. Variabel Dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis data variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gowa adalah retribusi dibandingkan dengan pajak daerah dan laba BUMD Kabupaten Gowa.

Perubahan mendasar pada Perkembangan pembangunan Kabupaten Gowa adalah Kabupaten Gowa menjadi salah satu Kabupaten jasa dan akan menjadi pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan banyak penduduk diluar Kabupaten Gowa yang datang ke Kabupaten Gowa sehingga berpotensi untuk dibuka usaha-usaha baru seperti pembangunan hotel dan restoran. Meningkatnya pembangunan hotel dan restoran tersebut dapat

meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak pariwisata dan pajak parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa .

E. Pembahasan Penelitian

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1.115 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ H1 diterima (signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 persen pajak daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp. 1.115 dan sebaliknya setiap penurunan Rp.1 pajak daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan turun sebesar Rp. 1.115. Arah hubungan antara pajak daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah(+). dimana kenaikan atau penurunan pajak daerah Kabupaten Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri. Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan pendapatan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel diatas dimana nilai koefisien regresi sebesar 1.535 dengan tingkat signifikan $0,011 < 0,05$ H1 diterima (signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 Retribusi daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp. 1.535 dan sebaliknya setiap penurunan Rp. 1 retribusi daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan

turun sebesar Rp. 1.535. Arah hubungan antara retribusi daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah (+). dimana kenaikan atau penurunan retribusi daerah Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil studi ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010), Amri. Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

c. Pengaruh laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 723 dengan tingkat $0,338 < 0,05 H_0$ diterima (tidaksignifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 BUMD daerah Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar Rp. 723 dan sebaliknya setiap penurunan Rp.1 BUMD Kabupaten Gowa maka pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa akan turun sebesar Rp. 723. Arah hubungan antara retribusi daerah Kabupaten Gowa dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah searah(+), dimana kenaikan atau penurunan laba BUMD Kabupaten Gowa akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan BUMD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Jadi berdasarkan hasil uji signifikansi variabel yang paling berpengaruh adalah retribusi karena mengingat dari kontribusi retribusi yang diperoleh dari pajak hotel, wisata dan parkir telah memberikan kontribusi yang besar dibandingkan yang lain.

Berdasarkan hasil olah data juga dapat diketahui bahwa variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa adalah Retribusi, tingginya pendapatan retribusi di Kabupaten Gowa disebabkan oleh banyaknya investor yang berminat menanamkan modal (investasi) yang masuk di Kabupaten Gowa, pembangunan yang pesat akan berdampak pada penerimaan retribusi dari investasi yang dilakukan dengan akan dibukanya usaha-usaha baru. Seperti peningkatan penerimaan retribusi hotel, pajak restoran dan parkir telah memberikan kontribusi yang besar dibandingkan yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan laba BUMD terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat di lihat jika setiap ada peningkatan pajak daerah akan menaikkan PAD di Kabupaten Gowa.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat di lihat jika setiap ada peningkatan retribusi daerah akan menaikkan PAD di Kabupaten Gowa.
3. Berdasarkan hasil analisis data maka laba BUMD memberikan pengaruh positif (+) tapi tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gowa
4. Jadi persamaan regresinya adalah $Y = 6475688 + X_1 1,115 + X_2 1,535 + X_3 723$
5. Variabel yang paling berpengaruh dominan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa adalah variabel Retribusi Daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.535

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa diharapkan meningkatkan penerimaan pajak daerah setiap tahun dengan mengkaji potensi-potensi pajak yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa diharapkan meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki agar masyarakat dan investor lebih tertarik menanamkan modalnya, karena penerimaan retribusi daerah masih jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Gowa.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa diharapkan meningkatkan penerimaan laba BUMD dengan dengan cara mendorong pengelolaan yang efektif dan efisien oleh perusahaan-perusahaan milik daerah yang ada di Kabupaten Gowa.
4. Bagi Peneliti Lain. Dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pendapatan Asli Daerah (PAD).

LAMPIRAN DATA

1. PAJAK

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Jumlah Presentase Pajak (%)
2006	11.560.237	11.470.021	101%
2007	12.153.417	11.808.577	103%
2008	15.015.943	8.516.681	176%
2009	20.878.470	49.705.065	42%
2010	21.098.500	9.702.395	217%
2011	24.353.397	25.728.020	95%
2012	30.167.000	35.655.815	85%
2013	55.223.339	57.065.945	97%
2014	61.500.818	63.143.326	97%
2015	70.579.000	72.080.464	98%
Jumlah	322.530.121	344.876.309	94%

2. RETRIBUSI

Tahun	Target	Realisasi Retribusi	Jumlah Presentase Retribusi (%)
2006	10.355.200	16.437.036	63%
2007	15.665.752	15.080.961	104%
2008	21.817.814	26.258.847	83%
2009	24.760.065	29.964.878	83%
2010	30.553.065	36.660.593	83%
2011	32.081.060	32.506.992	99%
2012	35.311.098	31.223.980	113%
2013	36.891.000	37.494.501	98%

2014	40.357.505	53.159.807	76%
2015	44.611.124	45.700.441	98%
Jumlah	292.403.683	324.488.036	90%

3. Laba BUMD

Tahun	Target	Realisasi laba BUMD	Jumlah presentase laba BUMD (%)
2006	423.180	557.567	8%
2007	635.720	694.427	9%
2008	1.100.970	1.348.051	82%
2009	1.272.060	-	-
2010	1.731.890	2.489.025	70%
2011	2.000.230	1.692.635	118%
2012	2.272.042	2.004.196	113%
2013	2.382.220	3.075.276	77%
2014	2.433.100	2.444.802	100%
2015	2.500.000	2.507.985	100%
Jumlah	16.751.412	16.813.964	100%

4. PAD

Tahun	Target	Realisasi PAD	PERTUMBUHAN (%)
2006	20.665.752	35.703.518	58%
2007	27.814.817	33.371.642	83%
2008	30.553.899	45.827.484	67%
2009	40.760.500	85.398.844	48%
2010	51.505.357	54.812.691	94%
2011	65.718.891	82.221.491	80%
2012	73.408.601	78.700.220	93%

2013	98.060.081	109.776.256	89%
2014	120.124.000	149.352.694	80%
2015	145.814.891	154.772.383	94%
Jumlah	674.426.789	829.937.964	81%

Uji Regresi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.965	8206080.23574

a. Predictors: (Constant), LABA BUMD (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1676798403545 8420.000	3	5589328011819 475.000	83.002	.000 ^b
	Residual	4040385170123 06.400		6		
	Total	1717202255247 0730.000	9			

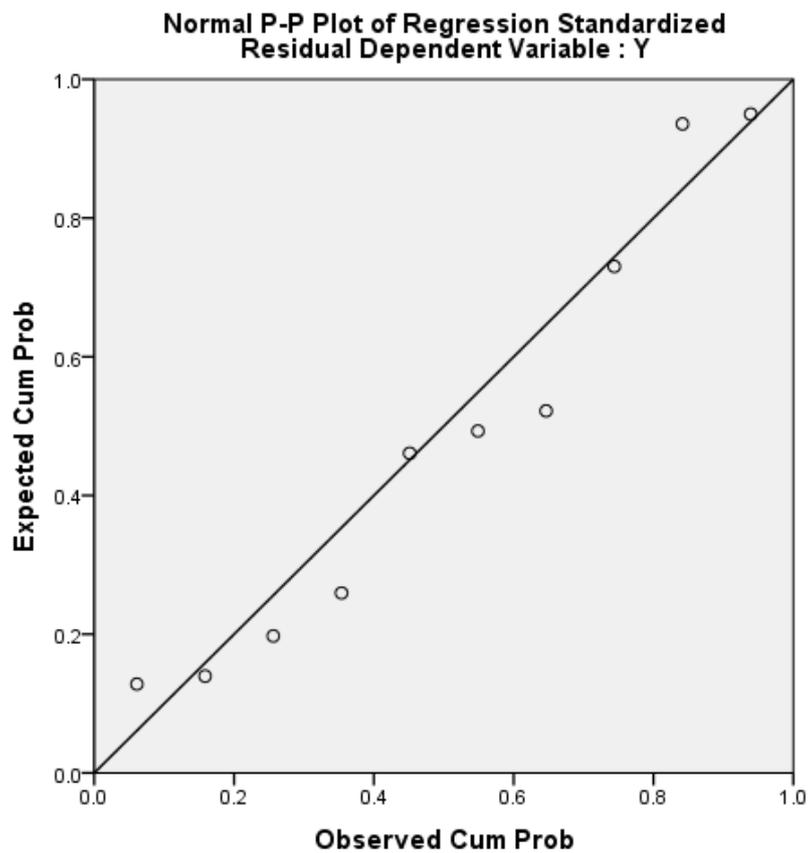
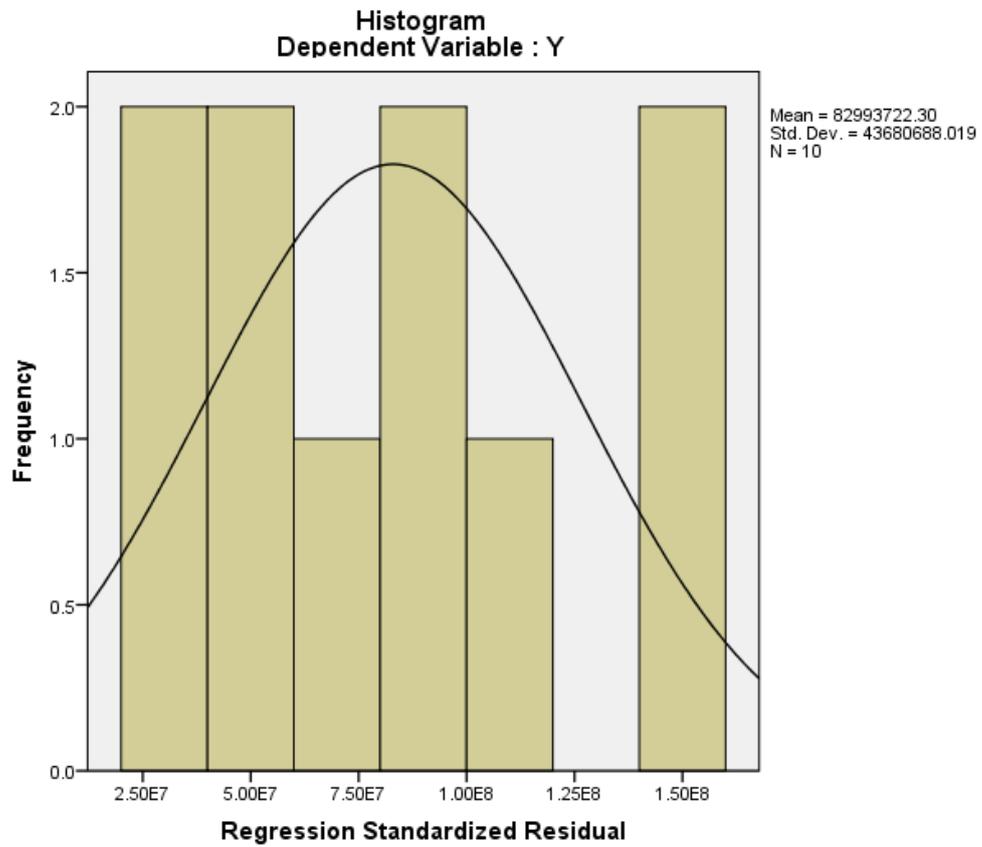
a. Dependent Variable: PAD (Y)

b. Predictors: (Constant), LABA BUMD (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6475688.047	8795721.763		-.736	.489
	PAJAK (X1)	1.115	.181	.624	6.160	.001
	RETRIBUSI (X2)	1.535	.496	.414	3.096	.021
	LABA BUMD (X3)	.723	4.150	.017	.174	.867

a. Dependent Variable: PAD (Y)



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. N. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur . *Simki-Economic Vol. 01 No. 08 Tahun 2017*, 1-10.
- Bratakusumah, D. S. (2013). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Z. (2014). *Strategi Pendayagunaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD) dalam Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum*. Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
- Gowa, B. K. (2017). *Gowa Dalam Angka*. Gowa.
- Halim, A. (2012). Analisis Kontribusi Bumd Terhadap Peningkatan Pad Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Akuntansi Keuangan Daerah*, 1-14.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, S. (2015). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Semarang: Yayasan Obor Indonesia.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Mustika, W. A. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-24.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak

- Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 1-25.
- Prasetyo, R. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- R. Soedargo. (2015). *Pajak-daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Eresco.
- Ruswandi, R. R. (2009). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1-30.
- Samudra, A. A. (2014). *Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugianto. (2013). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Sutiyoso. (2016). *Reinventing badan usaha milik daerah (BUMD)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syafrudin, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kudus Tahun 2004-2013. 1-13.
- Syahrial, & Munzir. (2007). Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ekonis*, 1-17.
- Universitas Dian, A. N., & Nuswantoro. (2012). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. 1-14.
- Usman, U. (2012). Analisis Pengaruh Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara. 1-9.
- Utomo, O. S. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 1-14.
- Wahyuni, E. (2012). *Kebijakan dan manajemen privatisasi BUMD*. Michigan: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.